

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian, karenanya revitalisasi pertanian sangat strategis untuk dilaksanakan, guna memacu pembangunan perdesaan dengan pengembangan kawasan agropolitan, yaitu mengubah kawasan perdesaan menjadi kota pertanian yang berkembang dan mampu menghela pembangunan wilayah perdesaan sekitarnya . Agropolitan merupakan model perencanaan pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedman dan Douglass dalam (Baruwadi, *et. all.*, 2009: 1). Konsep perencanaan ini sebagai jawaban atas kegagalan konsep perencanaan wilayah berdasarkan pertumbuhan diterapkan pada wilayah yang berbasis pertanian.

Mengintegrasikan desa dan kota yang ada kedalam konsep distrik agropolitan untuk menghindari tumbuhnya kota-kota diluar kendali sistem pengembangan wilayah agropolitan. Upaya ini selain menghindari kesenjangan antara pemukiman yang ada dengan pengembangan kota-kota tani akan mengintegrasikan penduduk lokal dalam skim pengembangan wilayah agropolitan serta sekaligus merupakan upaya meningkatkan fungsi desa dan kota yang ada menjadi kota-kota tani. Kota-kota tani yang direncanakan tidak selalu kota baru. Sistem jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan kota utama dengan kota-kota lainnya harus sesuai dengan Undang –undang jalan karena itu pula sistem transportasi, jaringan jalan, modal transportasi serta interkoneksi sistem jaringan secara regional harus dirancang secara terpadu dengan sistem kota-kota tani.

Pada Tahun 1996, Jhon Friedman dalam Muhammad dan Akuba, (2007:33) sebagai pencetus pengembangan agropolitan memodifikasi konsep agropolitan yang disebutnya model urbanisasi modular. Model Modular Urbanisasi (MMU) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Modul perkotaan terletak pada daerah pedesaan padat populasi atau daerah pinggiran kota terdiri atas unit pemerintahan lokal atau kecamatan dengan penduduk 10.000-15.000 jiwa tersebar pada areal 10-15 km².
- 2) Setiap kecamatan memiliki pusat pelayanan yang mudah ditempuh dengan jalan kaki atau sepeda dari berbagai bagian kecamatan dalam waktu 20 menit atau kurang.

- 3) Setiap pusat pelayanan memiliki fasilitas pelayanan publik standar meliputi: pasar (terbuka dan tertutup), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), fasilitas dan pelayanan kesehatan dasar, fasilitas olahraga, pusat pelayanan pemerintah, kantor pos dan telekomunikasi, kantor polisi, terminal angkutan, pabrik air minum, pusat perkantoran dan bisnis, perumahan untuk pegawai pemerintah (sebagian besar penduduk tinggal di daerah pertanian diluar pusat kota).
- 4) Setiap pusat kecamatan dihubungkan dengan pusat kecamatan lainnya dalam satu wilayah kabupaten dengan jaringan jalan segala musim (*all-weather roads*) yang memiliki jalur terpisah antara pejalan kaki, sepeda, sepeda motor, kendaraan yang ditarik hewan, bus dan truk.
- 5) Jika memungkinkan, listrik energi surya dibangun untuk kebutuhan rumah tangga dan pelayanan publik
- 6) Industri manufaktur skala kecil tersebar di desa-desa dan sepanjang jalan
- 7) Tujuan dari pengembangan agropolitan adalah menciptakan dalam kerangka regional, ekonomi kabupaten yang seimbang.

Mengingat hal tersebut maka pemerintah pusat dan daerah telah mencanangkan program agropolitan di daerah untuk memacu pembangunan pertanian sekaligus menjadi motor penggerak pembangunan perekonomian daerah guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konsep pengembangan agropolitan, petani atau masyarakat desa tidak perlu harus pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan, berupa pelayanan yang berhubungan dengan produksi dan pemasaran, kebutuhan sosial budaya serta kebutuhan sehari-hari.

Provinsi Gorontalo telah mencanangkan program agropolitan ini sejak Tahun 2002. Konsep agropolitan ini telah menarik perhatian berbagai kalangan, pemerintah pusat, akademisi, dan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, program agropolitan ini juga telah mendapatkan sambutan petani/masyarakat dan para stakeholder telah dapat meningkatkan produksi jagung sekaligus pendapatan dan kesejahteraan petani. Program Agropolitan berbasis jagung telah menjadikan Provinsi Gorontalo dikenal ditingkat Nasional dan bahkan Internasional, (Muhammad dan Akuba, 2007:3).

Provinsi Gorontalo dalam mencanangkan program agropolitan diawali dengan merumuskan visi, misi tujuan dan strategi. Adapun strategi dalam pembangunan program agropolitan di Provinsi Gorontalo disebut dengan 9 pilar agropolitan, yaitu: penyediaan alat dan

mesin pertanian, penyediaan dana pinjaman petani, penyediaan saprodi, penetapan harga dasar jagung, pembangunan irigasi, pembangunan percontohan jagung, peningkatan sumberdaya manusia (SDM) pertanian, penelitian dan pengembangan jagung, serta perencanaan dan koordinasi dalam rangka peningkatan keselarasan kebijakan.

Kabupaten Pohuwato adalah bagian dari Provinsi Gorontalo yang merupakan salah satu kawasan agropolitan dengan luas lahan pertanian yang cukup luas sebesar 132.126 ha dengan jumlah produksi tanaman jagung tertinggi sebesar 330.342 ton pada Tahun 2012 dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Kabupaten Pohuwato sampai dengan saat ini masih mencanangkan program agropolitan dan juga sebagai salah satu daerah percontohan agropolitan di Provinsi Gorontalo.

Kecamatan Patilanggio merupakan salah satu kecamatan dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pohuwato yang merupakan penghasil jagung terbesar. Ini dapat dilihat dengan sebagian besar mata pencarian masyarakat di Kecamatan Patilanggio bergerak disektor pertanian jagung. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato Tahun 2012, menyebutkan bahwa usahatani yang paling banyak dilakukan oleh penduduk di Kecamatan Patilanggio yaitu pada komoditas jagung dengan luas tanam 68.486 ha dan luas panen 64.760 ha ton dengan jumlah produksinya sebesar 63.764 ton. (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pohuwato 2012).

Permasalahan yang muncul dalam upaya pengembangan kawasan agropolitan adalah kesenjangan antara kebijakan strategis dan penerapannya di lapangan, khususnya meliputi aspek manajemen, agribisnis dan hukum. Kesenjangan di bidang manajemen berupa kesenjangan antara kebijakan di pemerintah pusat dan di daerah, kesenjangan antar instansi yang berkait dengan masalah pertanian/agribisnis. Kesenjangan di bidang agribisnis berupa kesenjangan antara kondisi agribisnis yang dicita-citakan pemerintah dengan kenyataan kondisi agribisnis di lapangan. Sedangkan kesenjangan di bidang hukum berupa kesenjangan antara landasan hukum pengembangan kawasan agropolitan di pusat dan di daerah.

Berdasarkan pemilihan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan jagung di Kabupaten Pohuwato khususnya di Kecamatan Patilanggio telah menimbulkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan program agropolitan di Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian tentang “Implementasi Kebijakan

Program Agropolitan Berbasis Jagung di Kabupaten Pohuwato (Studi Kasus Kecamatan Patilanggio)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi 9 pilar agropolitan Provinsi Gorontalo di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato?
2. Apakah program agropolitan di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato diimplementasikan berdasarkan model Friedman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi 9 pilar agropolitan Provinsi Gorontalo di Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
2. Implementasi konsep agropolitan model Friedman di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan program agropolitan di Provinsi Gorontalo in diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Peneliti, sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana di Universitas Negeri Gorontalo
2. Pemerintah, sebagai masukan bagi pengambil kebijakan untuk menyempurnakan konsep pengembangan kawasan agropolitan dan implementasinya di daerah pengembangan kawasan agropolitan.
3. Ilmuan/mahasiswa, dapat dipakai sebagai salah satu bahan referensi untuk pengembangan kawasan agropolitan.

